

**Pengaruh Pengetahuan *e-Filling*, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak sebagai
Variabel Moderasi**

(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

AGUS RAHMAT

90400114107

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Rahmat

Nim : 90400114107

Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 12 April 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Perumahan Saumata Indah

Judul : Pengaruh Pengetahuan *e-Filling*, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, September 2020

Penyusun.

AGUS RAHMAT
90400114107



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong - Gowa ☎ 424835, Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengetahuan *e-Filling*, Sosialisasi Pajak dan Saksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)"** yang disusun oleh Agus Rahmat, NIM: **90400114107**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, bertepatan dengan 21 Rajab 1441 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, September 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.

Munaqisy I : Dr. Amiruddin K. M.El

Munaqisy II : Jamaluddin M. SE., M.Si

Pembimbing I : Dr. Lince Buhutoding, SE., M.Si Ak

Pembimbing II: Sumarlun, SE., M.Ak

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang merupakan Rahmatan Lil Aalamiin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan *e-Filling*, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)”**. Penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Amiruddin dan Ibunda Hj. Fatmawati yang telah melahirkan,

mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag, selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, serta Wakil Dekan, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Memen Suwandi, SE,. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan nasihat dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini..
4. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Sumarlin, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. dan Jamaluddin M, SE., M Si. selaku penguji satu dan dua yang telah banyak memberikan kritikan dan masukan yang membangun.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makassar yang telah memberikan pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Seluruh staf akademik, tata usaha, serta staf jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makassar.
9. Rekan-rekan seperjuangan Contabilita angkatan 2014 terkhusus untuk Akuntansi C, terimakasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini serta telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.
10. Saudara Mustaqim Bahrn, S Ak., Fahrn Rijal, S, Ak., dan Sayyid Abu Azis, S. Ak. yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN khususnya untuk teman posko di Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang senantiasa memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tentu saja masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan karya tulis ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Pengembangan Hipotesis	15
G. Manfaat Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	
A. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	23
B. Teori Kepatuhan	24
C. Pengetahuan <i>e-filling</i>	25
D. Sosialisasi Pajak	27
E. Sanksi Perpajakan.....	29
F. Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
G. Akhlak	33
H. Rerangka Pikir.....	35

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel.....	38
C. Jenis dan Sumber data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Hasil Uji Kualitas Data.....	69
D. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	72
E. Hasil Uji Hipotesis.....	76
F. Pembahasan.....	88

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Keterbatasan Penelitian.....	97
C. Implikasi Penelitian.....	97

DAFTAR PUSTAKA.	99-102
-----------------------------	--------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Makassar Selatan Tahun 2013-2016.....	5
Tabel 1.2 : Indikator Pengatahuan <i>e-filling</i>	8
Tabel 1.3 :Indikator Sosialisasi Pajak	9
Tabel 1.4 : Indikator Sanksi Pajak	10
Tabel 1.5 : Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
Tabel 1.6 : Indikator Akhlak.....	11
Tabel 1.7 : Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 : Kriteria Penentuan Variabel Moderating.....	47
Tabel 4.1 : Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4.2 : Data Distribusi Kuesioner.....	56
Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	57
Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Tabel 4.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Status.....	58
Tabel 4.6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
Tabel 4.7 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	59
Tabel 4.8 : Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	60
Tabel 4.9 : Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak.....	61
Tabel 4.10 : Statistik Deskriptif Variabel	62
Tabel 4.11 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pengetahuan <i>e-filling</i>	63

Tabel 4.12 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sosialisasi Pajak	64
Tabel 4.13 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Perpajakan.....	65
Tabel 4.14: Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	66
Tabel 4.15: Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akhlak	68
Tabel 4.16 : Hasil Uji Validitas	69
Tabel 4.17 : Hasil Uji Reliabilitas.....	71
Tabel 4.18 : Hasil Uji Normalitas – One Sampel Kolmogrov-Smirnov	72
Tabel 4.19 : Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4.20 : Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park	76
Tabel 4.21 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	77
Tabel 4.22 : Hasil Uji f – Uji Simultan	78
Tabel 4.23 : Hasil Uji T-Uji Parsial	78
Tabel 4.24 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	82
Tabel 4.25 : Hasil Uji F – Uji Simultan	83
Tabel 4.26 : Hasil Uji t – Uji Parsial.....	84
Tabel 4.27 : Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi	53
Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas – <i>Normal Probability Plot</i>	73
Gambar 4.3 : Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot	75



ABSTRAK

Nama : Agus Rahmat

Nim : 90400114107

Judul :Pengaruh Pengetahuan *e-filling*, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta dengan akhlak sebagai variabel moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Makassar selatan, adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 64 wajib pajak.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survey kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji MRA. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan, analisis regresi dengan uji MRA untuk hipotesis pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan yang di moderasi oleh akhlak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akhlak memperkuat hubungan antara pengetahuan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak, akhlak memperlemah hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan akhlak memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, akhlak dan kepatuhan wajib pajak.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya penerimaan dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang ini (Andinata, 2015). Pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Jamaluddin, 2011).

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System*. Di Indonesia system perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Ilyas dan Burton, 2011). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan

keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Terbukti dari berita yang dikutip di kompas.com yang diakses pada tanggal 20 September 2017 yang menyatakan bahwa, kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan masih rendah, terbukti dengan tingkat *tax ratio* di Indonesia masih 10,3% dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia yang sudah diatas 13%, serta Vietnam dan Singapura sudah mencapai 16% (Putri dan Setiawan, 2017).. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, ada beberapa faktor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*.

E-filing dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail, 2018). Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat

dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT (Suherman dkk, 2015).

Ekstensifikasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan pemberian sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat dibutuhkan, sebab pengetahuan masyarakat akan tata cara perpajakan masih sangat kurang, selain itu proses dalam perpajakan juga terus mengalami pembaharuan, sehingga hal ini semakin mempersulit masyarakat. Kurangnya pengetahuan ini membuat masyarakat cenderung enggan untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga tentu saja hal ini berdampak pada penerimaan negara dari pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan menunjuk kantor pajak di masing-masing daerah oleh Dirjen Pajak (Agustini dan Widhiyani).

Mengingat pentingnya memastikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya, maka peraturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan. Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak, namun memuat sanksi dan hukuman apabila wajib pajak alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan tersebut mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya, hal ini menunjukkan bahwa sanksi atau denda perpajakan tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak. Penelitian Siregar (2017) dan (Pertiwi, 2014) telah

menunjukkan bahwa persepsi dan sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dari beberapa faktor tersebut yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ada faktor yang ada dalam diri wajib pajak itu sendiri yaitu akhlak. Akhlak merupakan suatu kemantapan jiwa secara jujur yang muncul dari keimanan untuk membenarkan yang haq atau menolak yang batil dalam setiap perilaku. Komponen keimanan seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam (Bulutoding, 2017). Akhlak timbul karena adanya hubungan baik dengan sang khaliq (pencipta) dan makhluk yang diciptakan. Konsep kepatuhan dalam Islam selalu menyerukan untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada ulil amri atau pemimpin (QS. 4:59). Ketaatan kepada pemimpin adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah sepanjang bukan perbuatan maksiat. Ketaatan kepada pemimpin dapat juga diartikan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban kepada negara dalam hal pajak. Ketaatan kepada Ulil Amri (pemegang kekuasaan) adalah ketaatan dalam perilaku kepatuhan pajak (Khamis dkk, 2011).

Beberapa faktor/upaya tersebut yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum patuh. Berikut tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Makassar Selatan Tahun 2013-2016.

Tabel 1.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Makassar Selatan
Tahun 2013-2016

NO	Tahun	Jumlah WP OP Wajib SPT Tahunan	Target Rasio Kepatuhan		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2013	84.147	54.696	65%	39.477	47%
2	2014	82.552	56.135	68%	38.932	47%
3	2015	81.576	55.472	68%	37.112	45%
4	2016	76.000	53.200	70%	40.332	53%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2013 hingga 2016, kondisi kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan hanya di tahun 2016.

Di Indonesia jumlah wajib pajak tidaklah sedikit. Terlebih khusus di Makassar, dapat dilihat berdasarkan data KPP Pratama Makassar Selatan yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak hingga tahun 2016 mencapai 82.932 wajib pajak, yang 76.000 merupakan wajib pajak orang pribadi. Namun, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 44.429 wajib pajak. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada di Makassar sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya (Annisa, 2018). Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan masalah dan data yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil

berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan akhlak sebagai variabel moderasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka peneliti mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan *e-Filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah akhlak memoderasi hubungan antara pengetahuan *e-Filling* dengan kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah akhlak memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak ?
6. Apakah akhlak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji hubungan antara pengetahuan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh akhlak.
5. Untuk menguji hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh akhlak.
6. Untuk menguji hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh akhlak.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengetahuan *e-Filing*

E-Filing adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui penyedia jasa aplikasi/*application service provider* (ASP). *E-Filing* diterapkan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Pelaporan menggunakan *E-Filing* mempunyai prosedur tersendiri. Penyampaian SPT melalui *E-Filing* dilakukan setelah wajib pajak memiliki *electronic filing identification number* (*e-FIN*) dan

digital certificate (DC). *E-filling* dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Laihad, 2013:45).

Tabel 1.2

Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan <i>e-Filling</i> (X1)	1. Pengetahuan tentang <i>e-filling</i> 2. Prosedur penggunaan <i>e-filling</i> 3. Tatacara penggunaan <i>e-filling</i>	Likert 1-4
Sumber:	(Ismail dkk, 2018)	

b). Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik itu peraturan perpajakan ataupun aturan atau tata cara perpajakan dengan metode yang tepat (Saragih,2013). SE (Surat Edaran) Dirjen Pajak NO.SE-98/PJ/2011 memuat tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dikutip oleh Herryanto dan Toly (2013). Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bisa dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melakukan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Kegiatan berinteraksi atau bertemu langsung dengan wajib pajak ataupun calon wajib pajak dinamakan sosialisasi langsung, sedangkan kegiatan interaksi atau sosialisasi

kepada masyarakat melalui media elektronik ataupun media cetak dan tidak melakukan interaksi dengan peserta ataupun wajib pajak dinamakan sosialisasi tidak langsung.

Tabel 1.3

Variabel	Indikator	Skala
Sosialisasi pajak (X2)	1. Tatacara Sosialisasi 2. Frekuensi Sosialisasi 3. Kejelasan Sosialisasi Pajak 4. Pengetahuan Perpajakan	Likert 1-4
Sumber:	(Arya Yogatama, 2014)	

c). Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 39)

Tabel 1.4

Variabel	Indikator	Skala
Sanksi Perpajakan (X3)	1. Sanksi pidana 2. Sanksi administrasi 3. Sanksi pajak tanpa toleransi. 4. Pengenaan sanksi untuk mendidik wajib pajak. 5. Pengenaan sanksi tanpa negosiasi.	Likert 1-4
Sumber:	(yadnyana, 2009)	

d). Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa adanya paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang masih berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009).

Tabel 1.5

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Pajak (Y)	1. Pendaftaran pajak 2. Penghitungan pajak 3. Pembayaran pajak 4. Pelaporan surat SPT	Likert 1-4
Sumber:	Madewing (2013) dan Bulutoding (2018)	

e). Akhlak

Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak. Bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khuluq, yang secara etimologis antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat akhlak adalah suatu kemantapan jiwa secara jujur yang muncul dari keimanan untuk membenarkan yang haq atau menolak yang batil dalam setiap perilaku. Komponen keiman seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam (Bulutoding, 2017). Akhlak timbul karena adanya hubungan baik dengan sang khaliq (pencipta) dan makhluk yang diciptakan.

Tabel 1.6

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Akhlak (M)	1. Pemahaman akidah 2. Pemahaman aturan 3. Ihsan	a. Pemahaman logis, fitrah, dan perintah b. Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi c. Norma-norma yang berlaku d. Taat terhadap aturan e. Menyadari bahwa perilaku kecurangan selalu diawasi	Likert 1-4
Sumber: (Adaptasi dari Bulutoding dkk, 2018)			

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh antara variabel independen yaitu, pengetahuan *e-Filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan akhlak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini sendiri dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.7
Penelitian Terdahulu

Nama	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Jumadil Ismail, Gasim, Fitriningsih Amalo	2018	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E – Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang)	Terdapat pengaruh penerapan sistem <i>E-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.dan Sosialisasi dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teguh Erawati dan Rita Ratnasari	2018	Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten Gunungkidul)	<p>Program <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepuasan kualitas pelayanan.</p> <p>Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.</p> <p>Program <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan,</p> <p>Program <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan kualitas pelayanan</p>
Siregar	2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Rosalina Novitasari	2015	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang III	<p>Secara parsial kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, namun pada kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

Anna Pertiwi	2014	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Bandung Karees)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
Renny Sri Utami	2013	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak (Survey Pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif
Permadi	2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial
Lince Bulutoding, Ambo Asse, Abd. Hamid Habbe dan Sanusi Fattah	2017	The Influence of <i>Akhlaq</i> to Tax Compliance Behavior, and <i>Niyyah</i> as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akhlak (moralitas) perilaku pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku pajak, niat perilaku pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan akhlak perilaku pajak memprediksi perilaku kepatuhan pajak.

F. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh pengetahuan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak

E-filing dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail dkk, 2018). *E-Filing* diterapkan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. *E-filling* sebagai salah satu program yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan. Saat ini, pengetahuan wajib pajak mengenai penggunaan teknologi baru (*internet*) sangat tinggi, sehingga wajib pajak berasumsi bahwa menggunakan *E-filing* akan lebih mudah dari pada dengan manual. Kemudahan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ismail dkk, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dkk (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Ratnasari (2018) bahwa penerapan system *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah penyampaian SPT dan pembayaran pajaknya maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan *e-Filling* (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Permadi, 2017). Adanya sosialisasi perpajakan ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta tata cara pembayaran pajak secara online dan juga akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh permadi (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan sosialisasi maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Sosialisasi pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Zain

(2007:35) menyatakan bahwa atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha menyeludupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana akan mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten berlaku untuk semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan Siregar (2017) sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Ardyanto dan Utaminingsih (2014) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, Wirawan dan Naniek (2017) dalam penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif karena ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi perpajakan (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Hubungan pengetahuan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh akhlak.

Akhlak merupakan faktor dari dalam individu. Akhlak merupakan pemberian atau rahmat dari Allah swt. sebagai wujud keimanan seseorang sehingga orang yang

berakhlak baik akan senantiasa bersikap sopan santun, mentaati perintah, jujur, membenarkan yang haq (benar) dan melawan yang batil (salah) (Bulutoding 2017). Akhlak mengarahkan pada bentuk moral, dalam bagaimana membedakan perihal baik atau salahnya tindakan yang diperbuat. Wajib pajak yang memiliki akhlak maka akan taat kepada pemimpin, ketaatan kepada pemimpin juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan kepada Tuhan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (maksiat atau kesalahan). Sebagai hasil dari pemikiran itu, Ketaatan kepada para pemimpin juga bisa berarti kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, misalnya pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya akhlak yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan patuh dalam membayar pajaknya dan mempelajari/mencari tahu tata cara pembayaran pajak. Dilain sisi pemerintah juga selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. penelitian Ismail, dkk (2018) dan penelitian Erawati dan Ratnasari (2018) memperoleh hasil bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Akhlak memoderasi hubungan antara pengetahuan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh akhlak.

Dahlia (2017) mengemukakan bahwa, akhlak atau karakter seseorang memiliki dua sisi: pertama, perilaku benar dalam hubungan dengan orang lain, seperti keadilan, kejujuran, rasa syukur dan cinta. Dan yang kedua, perilaku benar dalam orientasinya kepada diri sendiri, seperti kerendahan hati, ketabahan, kontrol diri, dan berusaha yang terbaik dari menyerah pada kemalasan. Akhlak baik yang dimiliki wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut akan selalu mengikuti dan menerima dengan baik apa yang disosialisasikan sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Permadi, 2017).

Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta tata cara pembayaran pajak secara online dan juga akan memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin sering dilakukan sosialisasi maka akan meningkatkan pemahan dan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan sehingga akan menumbuhkan rasa patuh dalam diri wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

permadi (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Akhlak memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh akhlak.

Akhlak merupakan wujud keimanan itu sendiri. Konsep keimanan yang membentuk akhlak seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam, yakni pemahaman akidah, pemahaman terhadap syariah dan ihsan. Adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak maka akan mengetahui bahwa sebagai warga Negara yang baik harus patuh dalam membayar pajak dan disisi lain jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ardyanto, 2014). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan cenderung memberikan banyak kerugian kepada mereka, hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Wirawan dan Naniek (2017) menyatakan bahwa dalam

penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif karena ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Sanksi perpajakan memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian diharapkan dapat menyempurnakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), dimana pionir dari teori ini adalah Ajzen (1991). Teori ini merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sebagai perantaranya dan dapat berdampak pada hal-hal tertentu saja. Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana. Hubungan dari *Theory of Planned Behaviour* dengan kepatuhan wajib pajak adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan keputusan wajib pajak orang pribadi. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat atau benefit pajak itu sendiri. Dan

dengan adanya sosialisas yang dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan dunia perpajakan, baik itu tentang system perpajakan, UU perpajakan, sanksi perpajakan, tata cara melaporkan, menghitung dan membayar pajak itu sendiri. Disamping itu juga jika wajib pajak memiliki akhlak yang baik akan menumbuhkan niat untuk patuh untuk membayar pajaknya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi (1)masyarakat, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarakannya langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara; (2)Badan usaha, membantu para pengusaha untuk memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak yang juga berpengaruh untuk kepentingan usahanya; dan (3)Kantor pelayanan pajak, diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak terutama kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak. Dengan adanya pengetahuan sistem perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan akhlak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1985) TPB menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta control keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga factor yaitu: (*Behavioral Beliefs*) merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. (*Normative Beliefs*) yaitu dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. (*Control Beliefs*) merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*) (Hafiz dan Saryadi, 2017).

Behavioral beliefs berkaitan dengan akhlak wajib pajak dalam penerapan *e-filing* yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak

melakukannya. *Normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan/sosialisai, yaitu ketika akan melakukan sesuatu individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

B. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Permadi (2017) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Menurut Deviano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan hal yang klasik dalam perpajakan. Berbagai teori kepatuhan pajak yang dikemukakan beberapa ahli menjelaskan tentang definisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Pendekatan sederhana dari kepatuhan pajak berpendapat bahwa ketika orang-orang memutuskan apakah membayar pajak mereka, mereka akan memperhitungkan besarnya pajak tersebut dan sanksi legal yang diterima dari ketidakpatuhan. Ardiyanto(2014) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai melaporkan seluruh pendapatan dan membayar seluruh pajak berdasarkan hukum, peraturan dan keputusan pengadilan.

C. Pengetahuan e-Filling

Pengetahuan merupakan salah satu ciri individu yang berpengaruh terhadap prestasi seorang pakar atau ahli dalam membuat keputusan. Selain itu, Hafiz (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan dan sistem

perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Mengingat saat sekarang teknologi sudah maju dan masyarakat sering menggunakan teknologi tersebut, maka Dirjen Pajak mengambil kesempatan ini untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya dengan cara dengan menerapkan *E-filing*. *E-filing* dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail dkk, 2018).

E-Filing adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat untuk wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui penyedia jasa aplikasi / *application service provider* (ASP) (Ismail dkk, 2018). *E-Filling* diterapkan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. *E-filling* sebagai salah satu program yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan. Kemudahan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak di berikan kemudahan dalam menyampaikan SPT tahunan maka wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Kepuasan wajib pajak adalah terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan konsumen atas pelayanan sesuai harapannya, dengan indikator hasil kerja petugas sesuai harapan, fasilitas dan persyaratan sesuai dengan spesifikasi (Erawati dan Ratnasari, 2018).

D. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Wulandari, 2015). Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat (Permadi, 2017). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Menurut Wulandari (2015) penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan institusi pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam jurnal Winerungan (2013) disebutkan ada beberapa bentuk strategi sosialisasi perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Publikasi (*Publication*)

Merupakan suatu aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik dari media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio atau televisi.

2. Kegiatan (*Event*).

Petugas pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan kegiatan tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada saat kegiatan tertentu. Misalnya dalam olahraga, kegiatan hari libur nasional dan lain sebagainya.

3. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan disini yaitu dalam arti khusus yang menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga dapat menjadi sarana pemberitahuan yang efektif. Pajak juga dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5. Pencantuman Identitas (*Identity*)

Pencatuman identitas disini yaitu berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana pemberitahuan.

6. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*)

Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu dalam mensosialisasikan mengenai pajak terhadap masyarakat.

E. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 39). Wirawan dan Naniek (2017) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar Undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menyangkut pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana (Mardiasmo, 2011).

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pertiwi, 2014). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

F. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, dihadapkan pada kondisi yang masih belum optimalnya sistem perpajakan dijalankan. Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri.

Pengertian kepatuhan pajak dapat didefinisikan menjadi dua macam, yaitu pengertian secara sederhana dan secara komprehensif. Pengertian kepatuhan secara sederhana adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Siregar, 2017). Pada sistem *self assessment* kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu dalam mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajak, baik SPT masa maupun SPT tahunan.

Masalah jumlah wajib pajak dari tahun ketahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya (Novitasari, 2015). Keengganan ini mungkin disebabkan oleh tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan yang masih sangat kurang. Masalah ini membuat pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk mencari solusinya, karena tingkat kepatuhan wajib pajak memegang peran penting dalam realisasi penerimaan pajak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
(An-Nisaa: 59)

Dalam ayat diatas telah menegaskan bahwa bagi setiap orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dan para pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin adalah salahsatu bentuk ketaatan kepada Allah sepanjang bukan perbuatan maksiat Ketaatan kepada pemimpin dapat juga diartikan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban kepada negara dalam hal pajak. Ketaatan kepada Ulil Amri (pemegang kekuasaan) adalah ketaatan dalam perilaku kepatuhan pajak Pada masa kini, pemungutan pajak berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menunjukkan bahwa sistem dan mekanismenya menjadi cirri tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia. Allah SWT telah mensyariatkan zakat mewajibkan dan menjadikan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya. Ini merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan. sebagai mana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٢٧

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. QS. Al-Baqarah: 227)

Menunaikan zakat adalah wajib bagi umat islam yang mampu. Maksudnya ialah mengeluarkan sebagian dari harta merupakan bagian mutlak dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kepada Rasulullah SAW. Beserta umat islam pada tahun kedua setelah hijrah. Maka oleh karena itu, pentingnya wajib melaksanakan

zakat bagi warga negara yang beragama islam. Dan hal ini dikaitkan dengan pajak yang berlangsung dinegara Indonesia yang notabennya beragama islam. Oleh sebab itu, sebagai warga negara kita diwajibkan untuk membayar pajak dan patuh guna untuk keperluan orang banyak. Meskipun dalam al-Qur'an melarang praktik pajak , tapi sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk menaati pemimpin selama perintah dari pemimpin tersebut adalah bukan kemaksiatan, maka kita wajib menaatinya. Rasulullah saw juga berwasiat kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulullah kemudian berpesan agar menaati pemimpinnya.

G. Akhlak

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam itu selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut *al-akhlâq alkarîmah*. Akhlakiyah (moralisme) menjadi karakter Islam karena akhlakiyah merasuk kedalam semua eksistensi Islam dan dalam semua ajarannya, sampai kepada akidah, ibadah, dan mu'amalah, serta masuk ke dalam politik dan ekonomi. akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak. Bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khuluq, yang secara etimologis antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat akhlak adalah suatu kemantapan jiwa secara jujur yang muncul dari keimanan untuk membenarkan yang haq atau menolak yang batil dalam setiap perilaku. Komponen keiman seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang

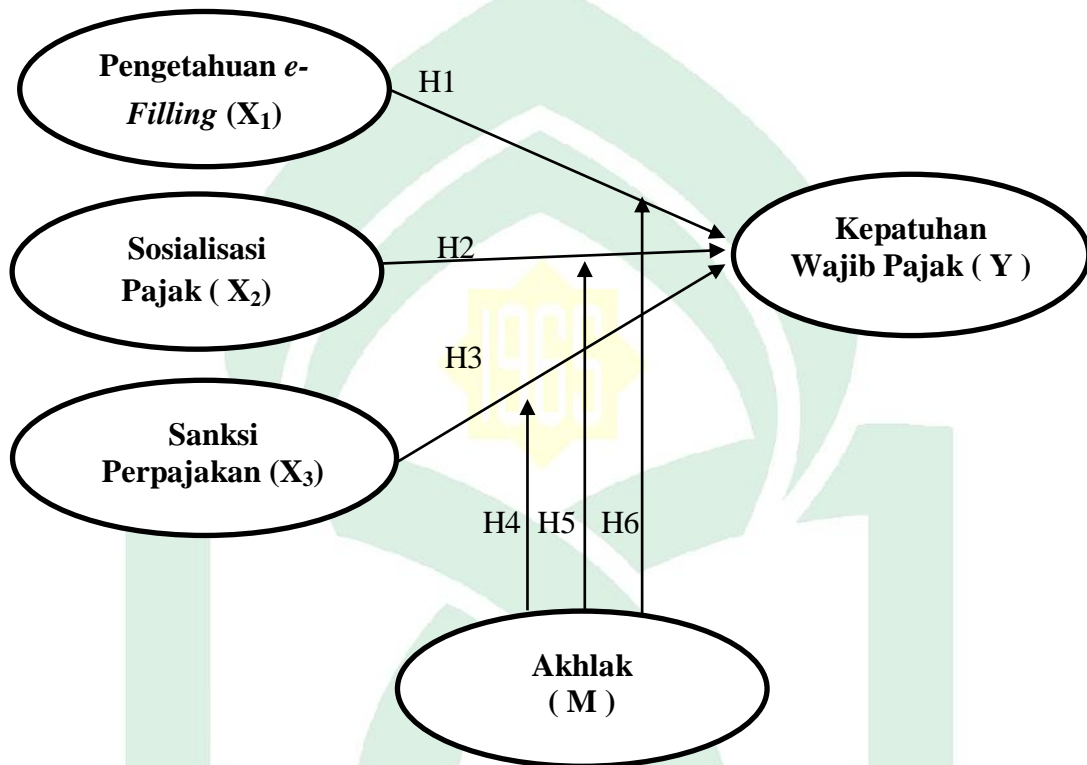
aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam (Bulutoding, 2017). Akhlak timbul karena adanya hubungan baik dengan sang khaliq (pencipta) dan makhluk yang diciptakan.

Islam selalu mengedepankan perilaku dengan akhlak yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Ajaran Islam merupakan ajaran yang berpusat pada pembentukan akhlak yang mulia dalam upaya memenuhi tuntutan agar dapat menjadi abdi Allah yang patuh. Konsep kepatuhan dalam Islam selalu menyerukan untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada ulil amri atau pemimpin (QS. 4:59). Ketaatan kepada pemimpin adalah salahsatu bentuk ketaatan kepada Allah sepanjang bukan perbuatan maksiat. Ketaatan kepada pemimpin dapat juga diartikan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban kepada negara dalam hal pajak. Ketaatan kepada Ulil Amri (pemegang kekuasaan) adalah ketaatan dalam perilaku kepatuhan pajak (Khamis dkk, 2011). Indikator perilaku kepatuhan pajak (Palil, 2010) adalah (1) Kesiediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang pajak, (2) Menyatakan (menghitung) pendapatan dengan benar (3) Mengklaim pemotongan yang benar (4) Membayar semua pajak tepat waktu. Ciri atau corak dari kepatuhan pajak menurut self assessment system (Undang-undang R.I. nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan) bahwa wajib pajak diwajibkan untuk (1) menghitung, (2) memperhitungkan, dan (3) membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang (4) melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar.

H. Rerangka Pikir

Kepatuhan wajib pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Menurut Pratami dkk (2017): Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kepatuhan wajib pajak melibatkan beberapa variabel untuk menemukan masalah tersebut. Adapun rerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dengan perhitungan statistic. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian ini untuk memberikan gambaran umum permasalahan yang jelas mengenai fakta yang diteliti. Tujuan Penelitian ini untuk menguji hipotesis dengan menentukan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Witono, 2008) atau dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status dari subjek yang diteliti..

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan yang terletak di jalan Urip Sumoharji KM. 4, Gedung Keuangan Negara 1 Panakkukang, Makassar.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang dengan kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu Indriantoro dan Supomo (2013:115). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representative. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer (*primary data*) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti (Siregar, 2013:37). Data primer dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tanpa melalui perantara, data primer juga biasanya juga diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang sudah disebarakan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan *e-Filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan akhlak kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini ada dua cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mengambil data terkait penelitian menggunakan internet, jurnal-jurnal publikasi, serta buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang dibahas. Sementara studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, yaitu fakta yang diungkap merupakan fakta actual yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, dimana sudah disediakan alternative jawaban dari pernyataan atau pertanyaan yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan jawaban terkait dengan penelitian ini (Pertiwi, 2014). Untuk memperoleh data yang lebih akurat kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi responden yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket atau kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Pengetahuan *e-Filling* (X1), sosialisasi pajak(X2), sanksi perpajakan (X3), akhlak (M) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk mengukur Pendapat responden digunakan 4 skala likert.

Angka 1 = Sangat tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak setuju (TS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 4 = Sangat setuju (ST)

E. Metode Analisi Data

Analisi data digunakan untuk menyederhnakan data agar lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif yang merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta actual yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, dimana sudah disediakan

alternative jawaban dan pernyataan yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Metode analisi data menggunakan statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan computer melalui program IBM SPSS 21 *for windows*.

1. Analisi Data Deskriptif

Analisis statistic deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistic deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian dan deskripsi setiap pernyataan kuesioner. Data tersebut antara lain: umur, jenis kelamin, status, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lama menjadi wajib pajak dan data mengenai deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas data

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrument penelitian sehingga dapat dikatakan instrument tersebut valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka butir pernyataan tersebut adalah valid.

2) Jika r hitung negative dan r hitung $< r$ tabel maka butir pernyataan tersebut tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur indicator variabel atau konstruk dari suatu kuesioner, Suatu kuesioner reliable atau handal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengujian realibilitas yang digunakan adalah *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi dengan pertanyaan lain. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan *cronbach alpha* $> 0,60$ atau lebih besar daripada 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini mencakup hal sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid. Salah satu cara

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan:

- i. Melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan
- ii. *Normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013)

Cara lain adalah dengan uji statistic *one-simple kolmogrov-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan *One-simple kolmogrov-smirnov* adalah:

1. Jika hasil *one-simple kolmogrov-smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika hasil *one-simple kolmogrov-smirnov* dibawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independent yang nilai korelasi antar semua

variabel independent sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolonieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
- 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2013).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah residual (Ghozali, 2013). Cara lain yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah uji *glejser*. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Jika tingkat signifikannya diatas 0,005 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesi

a. Analisa Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.

Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

X1 = Pengetahuan *e-Filling*

X2 = Sosialisasi Pajak

X3 = sanksi perpajakan

$\beta_1 - \beta_2 - \beta_3$ = Koefisien regresi berganda

e = error term

2. Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk menguji variabel moderating, digunakan Uji Interaksi. Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan “aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau

lebih variabel independen)” Liana(2009). Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 M + \beta_5 X_1 M + \beta_6 X_2 M + \beta_7 X_3 M + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

X1 = Pengetahuan *e-filling*

X2 = Sosialisasi pajak

X3 = Sanksi perpajakan

M = Akhlak

X1M, X2M dan X3M = Interaksi antara Pengetahuan *e-filling*,
Sosialisasi pajak, Sanksi perpajakan dengan
akhlak

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi berganda

e = *error term*

Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang digunakan memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut (Atmaja: 2008):

Tabel 3.1
Kriteria Penentuan Variabel Moderating

No	Tipe Moderasi	Koefisien
1	<i>Pure</i> Moderasi	b_2 Tidak Signifikan b_3 Signifikan
2	<i>Quasi</i> Moderasi	b_2 Signifikan b_3 Signifikan
3	<i>Homologiser</i> Moderasi (Bukan Moderasi)	b_2 Tidak Signifikan b_3 Tidak Signifikan
4	Prediktor	b_2 Signifikan b_3 Tidak Signifikan

Keterangan:

b_2 : variabel akhlak

b_3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (pengetahuan *e-Filling*, sosialisasi dan sanksi perpajakan) dengan variabel akhlak.

Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi secara parsial (t-test):

1) Analisis koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R bernilai besar (mendeteksi berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

2) Uji regresi secara simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan criteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat:

- a) Membandingkan t hitung dengan t tabel (1) jika t hitung $>$ t tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. (2) jika t hitung $<$ t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b) Melihat *probabilities values*

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$

- (1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka hipotesis ditolak
- (2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis diterima

3) Uji regresi secara parsial

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen.

Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:

- a) Membandingkan t hitung dengan t table

(1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

(2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

b) Melihat *probabilities values*

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

(1) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak

(2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis diterima

(3) Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negative) walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan merupakan unit kerja vertical yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara 1 di Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Makassar, Sebagai salah satu implementasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tat kerja instansi vertikal di lingkungan DJP sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 67/PKM.01/2008 tanggal 6 mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Pratama Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai tanggal 27 mei 2008 sesuai dengan keputusan DJP No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi di launching oleh menteri keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “Pratama”, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan Menjadi KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tatakerja instansi vertical DJP. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian dan 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksa pajak.

1. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan

Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.”

Misi Direktorat Jenderal Pajak

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.”

Visi KPP Pratama Makassar Selatan

“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”

Misi KPP Pratama Makassar Selatan

“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan pada undang-undang perpajakan”

2. Nilai-Nilai Perusahaan

1. Integritas: Berfikir, berkata berprilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Dapat dilakukan dengan bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya serta menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
2. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Dapat dilakukan

dengan mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, dan bekerja dengan hati.

3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dapat dilakukan dengan memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Dapat dilakukan dengan melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku, serta bersikap proaktif dan cepat.
5. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Dapat dilakukan dengan perbaikan terus menerus serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut: Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

5. Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 KPP di kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan yaitu:

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar.

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec. Panakkukang

sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec. Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

6. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013-2017

Tabel 4.1
Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

	2013	2014	2015	2016	2017
1. WP Terdaftar	108.250	117.090	130.688	142.441	154.091
• Badan	12.469	13.471	14.255	15.291	16.461
• OP Non Karyawan	16.323	14.807	15.723	17.303	19.077
• OP Karyawan	79.458	88.812	100.710	109.847	118.553
	2013	2014	2015	2016	2017
2. WP Terdaftar Wajib SPT	91.862	89.820	88.540	82.932	83.262
• Badan	7.715	7.268	6.964	6.932	6.420
• OP Non Karyawan	10.671	8.953	6.049	6.394	7.121
• OP Karyawan	73.476	73.599	75.527	69.606	69.721
	2013	2014	2015	2016	2017
3. Realisasi SPT	42.889	42.307	40.841	44.400	45.745
• Badan	3.375	3.357	3.724	4.094	3.949
• OP Non Karyawan	2.316	2.069	2.589	2.559	3.231
• OP Karyawan	37.198	36.881	34.528	37.747	38.565
	2013	2014	2015	2016	2017
4. Rasio Kepatuhan (3 : 2)	0,47	0,47	0,46	0,54	0,55
• Badan	0,44	0,46	0,53	0,59	0,62
• OP Non Karyawan	0,22	0,23	0,43	0,4	0,45
• OP Karyawan	0,51	0,5	0,46	0,54	0,55

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, baik wajib pajak terdaftar SPT maupun realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak setiap tahunnya. Selain itu, rasio kepatuhannya juga menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya bahkan pada tahun terakhir mencapai 55% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dari para wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sudah sebagian besar menunjukkan kepatuhannya dalam mematuhi kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Adapun jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 70 kuesioner dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang disebarkan	70	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	6	8,58 %
3	Kuesioner yang kembali	64	91,42 %
4	Kuesioner yang cacat	0	0%
5	Kuesioner yang dapat diolah	64	91,42 %

N sampel = 64

Responden = $(64/70) \times 100\% = 91,42\%$

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 70 butir dan jumlah yang kembali dan dapat diolah sebanyak 64 butir atau tingkat pengembalian adalah 91,42% dari total yang disebarkan. Sedangkan yang tidak kembali adalah 6 butir atau tingkat yang diperoleh sebesar 8,58%. Dari kuesioner yang tidak kembali dikarenakan kesibukan dari beberapa wajib pajak KPP

Pratama Makassar Selatan, selain itu juga ada beberapa wajib pajak yang tidak sengaja menghilangkan kuesioner tersebut.

Terdapat 7 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, status, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lama menjadi wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Karakteristik akan dijelaskan pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

a. Umur

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
20-30	33	51.6	51.6	51.6
31-40	18	28.1	28.1	79.7
Valid 41-50	9	14.1	14.1	93.8
>50	4	6.3	6.3	100.0
Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan umur responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur 20-30 tahun yaitu sebanyak 33 responden atau sebesar 51,6 umur dari 31-40 tahun sebanyak 18 responden atau sebesar 28,1%, umur 41-50 tahun sebanyak 9 responden atau sebesar 14,1% dan responden yang berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 4 responden atau sebesar 6,3%.

b. Jenis Kelamin

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Wanita	29	45.3	45.3	45.3
Valid Pria	35	54.7	54.7	100.0
Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin wanita sebanyak 29 responden atau sebesar 45,3% dan pria sebanyak 35 responden atau sebesar 54,7%.

c. Status

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Status
Status

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Belum	31	48.4	48.4	48.4
Valid Menikah	33	51.6	51.6	100.0
Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang telah menikah sebanyak 33 responden atau sebesar 51,6% dan belum menikah sebanyak 31 responden atau sebesar 48,4%.

d. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S3	4	6.3	6.3	6.3
	S2	21	32.8	32.8	39.1
	S1	25	39.1	39.1	78.1
	D3	10	15.6	15.6	93.8
	SMA/SMK	4	6.3	6.3	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh pendidikan strata 1 (S1) sebanyak 25 wajib pajak atau sebesar 39,1%, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan strata (S2) sebanyak 21 wajib pajak atau sebesar 32,8%, responden dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 4 wajib pajak atau sebesar 6,3%, responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 10 atau sebesar 15,6% dan untuk responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 4 atau sebesar 6,3%.

e. Pekerjaan

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	14	21.9	21.9	21.9
	Wirausaha	24	37.5	37.5	59.4
	Lainnya	26	40.6	40.6	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden didominasi oleh pekerjaan selain PNS dan wirausaha yakni sebanyak 26 orang wajib pajak atau sebesar 40,6%, sedangkan responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 14 orang wajib pajak atau sebesar 21,9%, dan wirausaha sebanyak 24 orang atau sebesar 37,5%.

f. Penghasilan

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<25	40	62.5	62.5	62.5
26-50	19	29.7	29.7	92.2
Valid 51-75	4	6.3	6.3	98.4
76-100	1	1.6	1.6	100.0
Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini sebagian besar penghasilan responden sebanyak <25 juta pertahun sebanyak 40 responden atau sebesar 62,5%, kemudian penghasilan responden 26-50 juta pertahun sebanyak 19 responden atau sebesar 29,7%, kemudian responden yang memiliki penghasilan sebesar 51-75 juta pertahun sebanyak 4 responden atau sebesar 6,3% dan responden yang memiliki penghasilan 76-100 juta pertahun sebanyak 1 responden atau sebesar 1,6%.

g. Lama Menjadi Wajib Pajak

Tabel 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib pajak
Lama Menjadi Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5	38	59.4	59.4	59.4
6-10	18	28.1	28.1	87.5
11-15	3	4.7	4.7	92.2
16-20	3	4.7	4.7	96.9
>20	2	3.1	3.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini sebagian besar responden telah menjadi wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan selama 1-5 tahun sebanyak 38 responden atau sebesar 59,4%, kemudian 6-10 tahun sebanyak 18 responden atau sebesar 28,1%, kemudian 11-15 tahun sebanyak 3 responden atau sebesar 4,7% , 16-20 tahun sebanyak 3 responden atau sebesar 4,7% dan >20 tahun sebanyak 2 responden atau sebesar 3,1%.

a. Analisis Deskriptif Variabel

Deskripsi variabel dari 64 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan <i>e-filling</i>	64	7	12	10.08	1.238
Sosialisasi pajak	64	6	24	19.25	2.714
Sanksi perpajakan	64	7	18	14.17	2.186
Kepatuhan wajib pajak	64	9	15	12.53	1.272
Akhlak	64	13	24	19.27	2.132
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan statistic deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel 4.10 hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap pengetahuan *e-filling* menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 12, mean (rata-rata) sebesar 10,08 dengan standar deviasi sebesar 1,238. Selanjutnya hasil analisi dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variabel sosialisasi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 24, mean (rata-rata) sebesar 19,25 dengan standar deviasi sebesar 2,714. Selanjutnya hasil analisi dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 18, mean (rata-rata) sebesar 14,17 dengan standar deviasi sebesar 2,186. Variabel akhlak menunjukkan nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 24, mean (rata-rata) sebesar 19,27 dengan standar deviasi sebesar 2,132. Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 15, mean (rata-rata) sebesar 12,53 dengan standar deviasi sebesar 1,272.

1) Analisis deskriptif variabel pengetahuan *e-filling* (X1)

Analisis deskriptif terhadap variabel pemahaman perpajakan terdiri dari 3 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai pengetahuan *e-filling* akan dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.11
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pengetahuan *e-filling*

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase			Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
X1.1		3	36	25	214	3,34
		4,7%	56,3%	39,1%		
X1.2		3	37	24	213	3,33
		4,7%	57,8%	37,5%		
X1.3		2	34	28	218	3,41
		3,1%	53,1%	43,8%		
	Rata-rata Keseluruhan					3,36

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 64 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel pengetahuan *e-filling* (X1) berada pada skor 3,36. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel pengetahuan *e-filling*. Pada variabel pengetahuan *e-filling*, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,41 berada pada item pernyataan ketiga. Sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa dengan adanya pengetahuan *e-filling*, maka ini membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang berujung pada peningkatan pendapatan negara.

2) Analisis Deskriptif Variabel Sosialisasi Pajak (X2)

Analisis deskriptif terhadap variabel sosialisasi pajak terdiri dari 6 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai sosialisasi pajak dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.12
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sosialisasi Pajak

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase			Skor	Mean
		STS	TS	S		
X2.1	1	3	41	19	206	3,22
	1,6%	4,7%	64,1%	29,7%		
X2.2	1	9	39	15	196	3,06
	1,6%	14,1%	60,9%	23,4%		
X2.3	1	8	37	18	200	3,13
	1,6%	12,5%	57,8%	28,1%		
X2.4	1	1	34	28	217	3,39
	1,6%	1,6%	53,1%	43,8%		
X2.5	1	4	33	26	212	3,31
	1,6%	6,3%	51,6%	40,6%		
X2.6	2	5	39	18	201	3,14
	3,1%	7,8%	60,9%	28,1%		
	Rata-rata Keseluruhan					3,21

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 64 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel sosialisasi pajak(X2) berada pada skor 3,21. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel sosialisasi pajak.

Pada variabel sosialisasi pajak, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,39 berada pada item pernyataan keempat. Sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa penerapan sosialisasi pajak memang sangat dibutuhkan, khususnya pada wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan. Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan maka wajib pajak akan mengerti mengenai kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kepatuhan pada wajib pajak itu sendiri.

3) Analisis Deskriptif Variabel sanksi perpajakan

Analisis deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan terdiri dari 5 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai sanksi perpajakan dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.13
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
X3.1	3	17	35	9	178	2,78
	4,7%	26,6%	54,7%	14,1%		
X3.2	1	27	29	7	170	2,66
	1,6%	42,2%	45,3%	10,9%		
X3.3	3	20	37	4	170	2,66
	4,7%	31,3%	57,8%	6,3%		
X3.4		2	46	16	206	2,22
		3,1%	71,9%	25,0%		
X3.5	4	15	31	14	183	2,86

	6,3%	23,4%	48,4%	21,9%		
	Rata-rata Keseluruhan					2,83

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 64 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel sanksi perpajakan (X3) berada pada skor 2,83. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel sanksi perpajakan. Pada variabel sanksi perpajakan, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 2,86 berada pada item pernyataan kelima. Sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa penerapan sanksi perpajakan memang sangat dibutuhkan, khususnya pada wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan. Semakin tinggi sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran, maka ini mampu memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

4) Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Analisa deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 8 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak akan dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.14
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
Y1		7	45	12	197	3,08
		10,9%	70,3%	18,8%		

Y2		7	45	12	197	3,08
		10,9%	70,3%	18,8%		
Y3		4	42	18	206	3,22
		6,3%	65,6%	28,1%		
Y4	1	5	41	17	201	3,16
	1,6%	7,8%	64,1%	26,6%		
	Rata-rata Keseluruhan					3,13

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 64 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berada pada skor 3,13. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak. Pada variabel kepatuhan wajib pajak, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,22 berada pada item pernyataan ketiga. Dapat dilihat dari sebagian besar wajib pajak yang setuju mengenai variabel kepatuhan wajib pajak ini yang dimaksudkan agar wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa adanya paksaan dalam membayar pajak yang akan berimbas pada pendapatan daerah untuk pembangunan dan menyediakan sarana dan prasarana.

5) Analisis Deskriptif Variabel Akhlak (M)

Analisis deskriptif terhadap variabel preferensi risiko terdiri dari 6 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai akhlak akan dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.15
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akhlak

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase				Skor	Mean
		STS	TS	S	SS		
M1	2	8	33	21	201	3,14	
	3,1%	12,5%	51,6%	32,8%			
M2		4	42	18	206	3,22	
		6,3%	65,6%	28,1%			
M3		5	44	15	202	3,16	
		7,8%	68,8%	23,4%			
M4		5	49	10	197	3,08	
		7,8%	76,6%	15,6%			
M5	1	3	29	31	218	3,41	
	1,6%	4,7%	45,3%	48,4%			
M6		4	39	21	209	3,27	
		6,3%	60,9%	32,8%			
	Rata-rata Keseluruhan					3,21	

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa dari 64 responden yang diteliti, secara umum persepsi esponden terhadap item-item pernyataan pada variabel akhlak (M) berada pada skor 3,21. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden setuju terhadap item-item pernyataan variabel akhlak. Pada variabel akhlak, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,41 berada pada item pernyataan kelima. Sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan

menganggap bahwa semakin tinggi akhlak wajib pajak, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

C. Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas instrument adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas instrumen yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dianalisa dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Untuk mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai *corrected item total correlation*. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung $>$ dari tabel r maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel $(n)=64$ responden dan besarnya df dapat dihitung $64-2=62$ dengan $df=62$ dan $\alpha=0,05$ didapat tabel $r = 0,247$. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	Tabel r	Keterangan
Pengetahuan <i>e-filling</i>	X1.1	0,704	0,247	Valid
	X1.2	0,757		Valid
	X1.3	0,738		Valid
Sosialisasi pajak	X2.1	0,674	0,247	Valid
	X2.2	0,731		Valid

	X2.3	0,707		Valid
	X2.4	0,681		Valid
	X2.5	0,679		Valid
	X2.6	0,696		Valid
Sanksi perpajakan	X3.1	0,696	0,247	Valid
	X3.2	0,593		Valid
	X3.3	0,657		Valid
	X3.4	0,337		Valid
	X3.5	0,780		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,421	0,247	Valid
	Y2	0,582		Valid
	Y3	0,696		Valid
	Y4	0,555		Valid
Akhlak	M1	0,658	0,247	Valid
	M2	0,696		Valid
	M3	0,679		Valid
	M4	0,490		Valid
	M5	0,610		Valid
	M6	0,437		Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel diatas menunjukan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada tabel r. hal ini berarti bahwa item-item pernyataan kuesioner yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan *Alpha Cronbach* yakni suatu instrument dikatakan *reliable* bila memiliki koefisien kendala realibilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pengetahuan <i>e-filling</i>	0,793	Reliabel
2.	Sosialisasi pajak	0,774	Reliabel
2.	Sanksi Perpajakan	0,748	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,690	Reliabel
4.	Akhlak	0,737	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan akhlak yaitu dinyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

D. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus terlebih dulu dilakukan sebelum uji regresi berganda, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi yang diperlukan adalah uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis sudah terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu *kolmogorov smirnov* dan *normal probability plot*. Uji *kolmogorov smirnov* lebih sering digunakan karena menghasilkan angka-angka yang lebih detail, dan hasil tersebut lebih dapat dipercaya. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai probabilitas *kolmogrov-smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil uji *kolmogrov smirnov* dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.18
Hasil Uji Normalitas – One Sampel Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

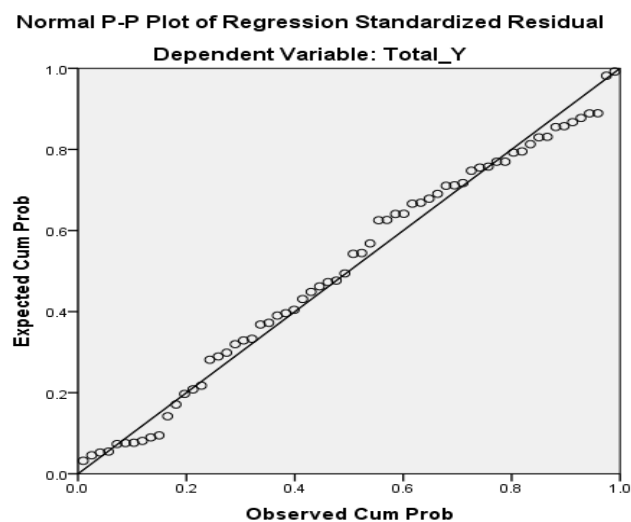
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.84487679
	Absolute	.086
Most Extreme Differences	Positive	.074
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.686
Asymp. Sig. (2-tailed)		.734

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat signifikan nilai *kolmogrov-smirnov* yang ditunjukkan dengan *asympt sig* (2 tailed) berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,734. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini distribusi normal. Selain uji *kolmogrov smirnov* cara lain cara lain untuk menguji normalitas yaitu dengan grafik normal probability plot.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot



Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal probability plot mengikuti garis diagonal. Hal ini berarti data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan diantara variabel

independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF), sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4.19
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan <i>e-filling</i>	,866	1,155
	Sosialisasi pajak	,796	1,257
	Sanksi Perpajakan	,775	1,291
	Akhlak	,842	1,188
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

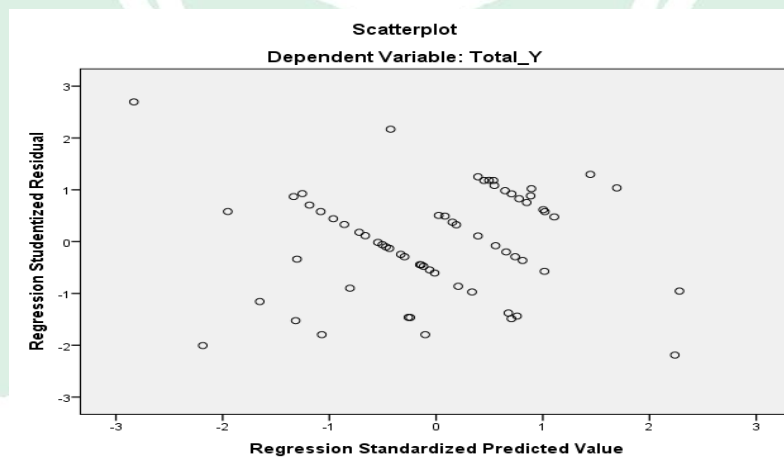
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.19 diatas, nilai *tolerance* yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel pengetahuan *e-filling* senilai 0,866, sosialisasi pajak senilai 0,796 sanksi perpajakan senilai 0,775, dan akhlak senilai 0,842. Adapun nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel pengetahuan *e-filling* senilai 1,155, sosialisasi pajak senilai 1,257 sanksi perpajakan senilai 1,291, dan akhlak senilai 1,188. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *scatter plot*. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *scatter plot* diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.3

Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot



Sumber : Output SPSS 21 (2019)

Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh akhlak.

Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji park. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.20. jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.20
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.162	.639		.253	.801
1 Pengetahuan <i>e-filling</i>	.028	.052	.073	.547	.586
Sosialisasi pajak	-.022	.025	-.122	-.865	.391
Sanksi perpajakan	.046	.029	.210	1.572	.121

a. Dependent Variable: RR

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Hasil uji park pada tabel 4.20 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas semua variabel independen berada diatas tingkat signifikan 0,05 jadi data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

E. Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3 menggunakan analisi regresi linear berganda dengan meregresi variabel independen (pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan untuk hipotesis H4, H5, H6 untuk menguji pengaruh moderasi akhlak dengan menggunakan

analisis moderasi dengan pendekatan uji MRA. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.

1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis H1, H2 dan H3

Pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 dilakukan dengan analisi regresi berganda untuk menguji pengaruh pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 ^a	.338	.305	1.061

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan *e-filling*, Sosialisasi Pajak

Sumber: *Output SPSS 21 (2019)*

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.21 menunjukkan nilai *R square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel 4.21 di atas nilai *Adjusted R square* sebesar 0,338. Hal ini menunjukkan bahwa 33,8% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan. Sisanya sebesar 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.22
Hasil Uji f – Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	34.457	3	11.486	10.212	.000 ^b
Residual	67.481	60	1.125		
Total	101.938	63			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi perpajakan, pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 4.22 diatas dapat dilihat dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil f hitung sebesar 10,212 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai hitung f sebesar 10,212 lebih besar dari nilai tabel f sebesar 2,76 ($df_1=4-1=3$ dan $df_2=64-4=60$). Beararti variabel pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.23
Hasil Uji T-Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.935	1.404		4.229	.000
Pengejtahuan <i>e-filling</i>	.233	.114	.227	2.045	.045
Sosialisasi pajak	.218	.055	.466	3.980	.000
Sanksi perpajakan	.003	.065	.005	.049	.961

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 5,935 + 0,233 X_1 + 0,218 X_2 + 0,003 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1 = Pengetahuan *e-filling*

X2 = Sosialisasi pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

e = standar error

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 5,935 menunjukkan bahwa jika variabel independen (pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan) diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 5,935.
- b. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan *e-filling* (X1) sebesar 0,233. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan *e-filling* (X1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,233.
- c. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak (X2) sebesar 0,218. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel sosialisasi pajak (X2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,218.
- d. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,003. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel sanksi perpajakan (X3) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,003.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2 dan H3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pengetahuan *e-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan *e-filling* memiliki t hitung sebesar 2,045 > t sebesar 1,76065 (sig $\alpha=0,05$ dan $df=n-k$ yaitu $64-4=60$) dengan koefisien beta *understandardized* sebesar 0,227 dan tingkat signifikansi 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima . hal ini berarti Pengetahuan *e-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang *e-filling*, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayarkan pajaknya baik WPOP maupun WP Badan guna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi pembangunan daerah dan pembiayaan nasional.
- b. Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel Sosialisasi pajak memiliki t hitung sebesar 3,980 > t sebesar 1,76065 (sig $\alpha=0,05$ dan $df=n-k$ yaitu $64-4=60$) dengan koefisien beta *understandardized* sebesar 0,466 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima . hal ini berarti Pengetahuan Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering DJP melakukan sosialisasi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak sehingga

wajib pajak akan patuh dalam membayarkan pajaknya baik WPOP maupun WP Badan guna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi pembangunan daerah dan pembiayaan nasional.

- c. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki t hitung sebesar $0,49 < \text{tabel } t$ sebesar $1,76065$ dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar $0,005$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,961$ yang lebih besar dari $0,05$ maka H_3 ditolak. Hal ini berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap upaya kepatuhan wajib pajak.. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi yang dikenakan bagi pelanggar, maka wajib pajak merasa terbebani dengan sanksi tersebut sehingga wajib pajak tidak patuh jika dikenakan sanksi yang berat bagi pelanggarnya.

2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Intraksi terhadap Hipotesis Penelitian H4, H5 dan H6

Untuk mengetahui bagaimana peran variabel akhlak dalam memoderasi pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut tabel dari hasil uji interaksi:

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.24
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.559	.504	.896

a. Predictors: (Constant), X3.M, Pengetahuan *e-filling*, Sosialisasi pajak, Akhlak, Sanksi perpajakan, X1.M, X2.M
Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.24 menunjukkan nilai *R Square* dari model regresi moderasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel moderasi dalam menjelaskan variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang didukung dengan variabel moderasi. Dari tabel 4.28 di atas nilai *R square* sebesar 0,559. Hal ini menunjukkan bahwa 55,9% kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan variabel pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh akhlak. Sisanya sebesar 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.25
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56.967	7	8.138	10.134	.000 ^b
	Residual	44.970	56	.803		
	Total	101.938	63			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), X3.M, Pengetahuan e-filling, Sosialisasi pajak, Akhlak, Sanksi perpajakan, X1.M, X2.M

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 4.25 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 10,134 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh dibawah 0,05. Dimana nilai f hitung 10,134 lebih besar dari nilai tabel f sebesar 2,76 ($df_1=4-1=3$ dan $df_2=64-4=60$). Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan akhlak secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

c. Regresi dengan interaksi menggunakan Uji MRA

Tabel 4.26
Hasil Uji t – Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.557	9.858		.665	.509
Pengetahuan e-filling	-1.617	.887	-1.575	-1.823	.074
Sosialisasi Pajak	1.741	.467	3.714	3.731	.000
Sanksi Perpajakan	-1.110	.498	-1.907	-2.228	.030
Akhlak	.001	.515	.001	.002	.999
X1_M	.094	.046	2.607	2.026	.048
X2_M	-.079	.024	-4.357	-3.268	.002
X3_M	.056	.026	2.637	2.130	.038

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Output SPSS 21 (2019)

Berdasarkan tabel 4.26 Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis penelitian H4, H5 dan H6 yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Akhlak memoderasi hubungan antara pengetahuan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji regresi tanpa interaksi pada tabel 4.26, diperoleh nilai signifikansi uji t variabel akhlak sebesar 0,999. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel akhlak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi pada tabel

diperoleh nilai signifikansi interaksi pengetahuan *e-filling* dan akhlak sebesar 0,48 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Artinya, koefisien b_2 tidak signifikan dan b_3 signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akhlak adalah variabel *pure moderasi* atau moderasi murni artinya variabel yang memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen tanpa menjadi variabel independen.

Hasil uji MRA yang terlihat pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa variabel moderasi $X1_M$ mempunyai t hitung sebesar $2,026 > t$ tabel $1,76065$ dengan koefisien beta understandardized sebesar $2,607$ dan tingkat signifikansi $0,048$ yang lebih kecil dari $0,05$, maka H_4 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel akhlak merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel pengetahuan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan akhlak memoderasi hubungan pengetahuan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima.

b) Akhlak memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji regresi tanpa interaksi pada tabel 4.26, diperoleh nilai signifikansi uji t variabel akhlak sebesar $0,999$. Nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel akhlak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi pada tabel diperoleh nilai signifikansi interaksi sosialisasi pajak dan akhlak sebesar $0,002$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Artinya, koefisien b_2 tidak signifikan dan b_3 signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel

akhlak adalah variabel *pure moderasi* atau moderasi murni artinya variabel yang memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen tanpa menjadi variabel independen.

Hasil uji MRA yang terlihat pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t hitung sebesar $-3,268 < t \text{ tabel } 1,76065$ dengan koefisien beta understandardized sebesar $-4,357$ dan tingkat signifikansi $0,002$ yang lebih kecil dari $0,05$, maka H5 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel akhlak merupakan variabel yang memoderasi hubungan variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi mengarah ke negatif. Jadi hipotesis kelima (H5) yang menyatakan akhlak merupakan variabel moderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima.

c) Akhlak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji regresi tanpa interaksi pada tabel 4.26, diperoleh nilai signifikansi uji t variabel akhlak sebesar $0,999$. Nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel akhlak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi pada tabel diperoleh nilai signifikansi interaksi sanksi perpajakan dan akhlak sebesar $0,038$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Artinya, koefisien b_2 tidak signifikan dan b_3 signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akhlak adalah variabel *pure moderasi* atau moderasi murni artinya variabel yang memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen tanpa menjadi variabel independen.

Dari hasil uji MRA yang terlihat pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t hitung sebesar 2,130 > t tabel 1,76065 dengan koefisien beta understandardized sebesar 2,637 dan tingkat signifikansi 0,038 yang lebih kecil dari 0,05, maka H6 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel akhlak merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keenam (H6) yang menyatakan akhlak memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima.

Tabel 4.27
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hubungan variabel	Hipotesis	Hasil
Pengetahuan <i>e_filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	H1	Diterima
Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	H2	Diterima
Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	H3	Ditolak
Akhlak memoderasi hubungan antara Pengetahuan <i>e_filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	H4	Diterima
Akhlak memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	H5	Diterima
Akhlak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	H6	Diterima

F. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan *e-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan wajib pajak terhadap *e-filling* dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Penerapan sistem e-filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan telah di pahami oleh wajib pajak. Wajib pajak sudah mengerti proses menggunakan sistem e-filing mulai dari mencetak nomor EFIN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah ditentukan dan sampai tahap proses percetakan EFIN. Selain itu wajib pajak juga telah mengerti efektifitas penggunaan *e-filling* dan keamanan data wajib pajak lebih terjamin.

Pengetahuan terhadap *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Selama sistem pelaporan pajak tersebut dapat memudahkan pekerjaan wajib pajak dan mudah dijalankan maka tingkat kepatuhan pajak juga meningkat. Begitupun sebaliknya jika sistem pelaporan pajak tersebut hanya membuat wajib pajak pusing dan tidak memudahkan pekerjaan mereka maka membuat wajib pajak tidak patuh. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1985) TPB menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*)

sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta control berperilaku yang dipersepsikan. Artinya dalam penelitian ini sikap wajib pajak untuk memilih dan mengetahui penggunaan sistem *e-filling* telah berjalan secara efektif. Dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang *e-filling* akan menumbuhkan niat berperilaku untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya karena wajib pajak tersebut merasa dimudahkan dalam penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Hasil penelitian ini diperkuat hasil penelitian Agustini (2016), Ismail dkk (2018), Erawati (2018) dan Lado dan Budiantara (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka semakin tinggi penerapan *e-filling* maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan telah memberikan kontribusi besar dalam hal meniadakan wajib pajak mengenai manfaat patuh bayar pajak. Hal ini dibuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Permadi, 2017).

Adanya sosialisasi perpajakan maka masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta tata cara pembayaran pajak secara

online dan juga akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1985) TPB menjelaskan Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku salah satunya ditentukan oleh faktor *Normative beliefs*. *Normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan/sosialisai, yaitu ketika akan melakukan sesuatu individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat hasil penelitian Novitasari (2015), Permadi (2017), Wijayanto (2015) dan Dharma dan Suardana (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak karena semakin sering Sosialisasi Perpajakan diadakan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa penerapan sanksi perpajakan akan menambah beban wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak maka semakin tinggi beban yang dirasakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak mengambil sikap menghindar untuk bayar pajak karena dihantui denda dari pihak fiskus baik denda administrasi maupun denda pidana (kurungan atau penjara).

Hasil penelitian ini diperkuat penelitian Rorong dkk (2017) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017), Ardyanto dan Utaminingsih (2014) dan Wirawan dan Naniek (2017) dalam penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif karena ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera.

4. Pengaruh akhlak dalam memoderasi pengetahuan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji moderasi menunjukkan bahwa pengaruh akhlak mampu mendorong keinginan untuk mengetahui dan mempelajari penggunaan *e-filing* yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki nilai-nilai kejujuran dan mampu

membenarkan sesuatu yang baik dengan harapan dapat patuh kepada pemerintah dalam hal ini DJP, cenderung akan mengerjakan perintah tersebut seperti penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik yang berdampak secara luas untuk kepetingan umum.

Wajib pajak yang memiliki akhlak maka akan taat kepada pemimpin, ketaatan kepada pemimpin juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan kepada Tuhan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (maksud atau kesalahan). Sebagai hasil dari pemikiran itu, Ketaatan kepada para pemimpin juga bisa berarti kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, misalnya pajak. Penelitian ini sejalan dengan teori Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap aturan yang dibuat untuk diikuti dan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Artinya semakin tinggi nilai-nilai akhlak wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan maka akan meningkatkan kesadarannya untuk patuh menggunakan *e-filing* dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Akhlak dalam Memoderasi Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan variabel akhlak memoderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah negatif. Artinya nilai akhlak sebagai moralitas atau nilai kejujuran wajib pajak cenderung diabaikan dan bertentangan dengan hati nurani mereka terkait upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kemudahan pelaporan pajak itu sendiri.

Persepsi wajib pajak terkait modernisasi sistem pelaporan pajak justru membuat mereka tidak mempunyai celah untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga pemerintah dalam hal ini DJP dipandang sebagai sesuatu yang terus menerus mengurus keuangannya dan akhirnya peran akhlak diabaikan. Karena pihak fiskus dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Dapat dimaknai bahwa wajib pajak KPP Makassar Selatan dengan peran akhlak belum mampu dijadikan sebagai pendorong untuk mensosialisasikan aturan-aturan perpajakan dalam rangka memkasimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Permadi, 2017).

6. Pengaruh Akhlak dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa adanya akhlak yang mendukung sanksi perpajakan akan meningkatkan atau memperkuat kepatuhan wajib pajak karena adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak akan memikirkan dampak atas perbuatannya dan akan patuh dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Menurut Witte dan Woodbury (1985) menyatakan

bahwa motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Selain itu, akhlak dibutuhkan untuk mendukung sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajibpajak. Akhlak merupakan wujud keimanan itu sendiri. Konsep keimanan yang membentuk akhlak seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam, yakni pemahaman akidah, pemahaman terhadap syariah dan ihsan.

Adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak maka akan mengetahui bahwa sebagai warga negara yang baik harus patuh dalam membayar pajak dan disisi lain jika tidak membayar pajak maka akan ada sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ardyanto, 2014). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan cenderung memberikan banyak kerugian kepada mereka, hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan akhlak sebagai variabel moderasi.

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan *e-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan wajib pajak terhadap *e-filling* dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan telah memberikan kontribusi besar dalam hal menyadarkan wajib pajak mengenai manfaat patuh bayar pajak. Hal ini dibuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

3. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan menganggap bahwa penerapan sanksi perpajakan akan menambah beban wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak maka semakin tinggi beban yang dirasakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak mengambil sikap menghindar untuk bayar pajak karena dihantui denda dari pihak fiskus baik denda administrasi maupun denda pidana (kurungan atau penjara).
4. Berdasarkan hasil uji moderasi menunjukkan bahwa pengaruh akhlak mampu mendorong keinginan untuk mengetahui dan mempelajari penggunaan *e-filling* yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki nilai-nilai kejujuran dan mampu membenarkan sesuatu yang baik dengan harapan dapat patuh kepada pemerintah dalam hal ini DJP, cenderung akan mengerjakan perintah tersebut seperti penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik yang berdampak secara luas untuk kepentingan umum.
5. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan variabel akhlak memoderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah negatif. Artinya nilai kahlak sebagai moralitas atau nilai kejujuran Wajib Pajak cenderung diabaikan dan bertentangan dengan hati nurani mereka

terkait upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kemudahan pelaporan pajak itu sendiri.

6. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa adanya akhlak yang mendukung sanksi perpajakan akan meningkatkan atau memperkuat kepatuhan wajib pajak karena adanya akhlak yang dimiliki wajib pajak akan memikirkan dampak atas perbuatannya dan akan patuh dengan peraturan yang berlaku.

B. Keterbatasan Peneliti

1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan survey secara normative, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.
2. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua wajib pajak dikarenakan terbatasnya waktu dan adanya kesibukan dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

C. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan. Adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara

dan dipergunakan untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

2. Badan usaha, membantu para pengusaha untuk memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak yang juga berpengaruh untuk kepentingan usahanya.
3. Kantor pelayanan pajak, diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak terutama kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak. Dengan adanya pemahaman pajak dan sanksi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Agustini, Komang Dewi, Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 27(2): 1343-1364.
- Agustiningsih, Wulandari.(2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2): 1-15.
- Annisa. Siti. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan).
- Ardyanto, Arif Angga dan Nanik Sri Utaminingsih. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2):57-78.
- Atmaja, Lukas Setia. 2008. *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*.
- Bulutoding, L., A. Asse., A.H. Abbe., & Fattah S. 2018. *The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior, and Niyyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia. Scientific Research Journal (SCIRJ)*. 6(1).
- Bulutoding, Lince. 2017. Analisis terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Manajemen Journal*. 1(2).
- Dahlia, Eis. 2017. Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
- Deviano, Sany dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan konsep, teori dan isu*. Kencana, Jakarta.
- Devos, Ken. 2009. An Investigation Into Australia Personal Tax Evaders Their Attitudes Toward Compliance and Penalties For Non Compliance. *Revenue Low Journal*, 19(1): 1-14.
- Dharma . Gede Pani Esa. Ketut Alit Suardana. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

- Erawati, Teguh, Rita Ratnasari. 2018. Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Spt Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Di Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program *IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas. Di Ponegoro.
- Hafiz, Miftahudin . Saryadi. 2017. Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Kebijakan Amnesti Pajak pada Umkm Di Kpp Pratama Semarang Tengah Dua).
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*. 1 (1):124-135.
- Ilyas,W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ismail. Jumadil. Gasim dan Fitriingsih Amalo. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E – Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (Ja)*. 5(3): 11-22.
- Jamaluddin. 2011. Pengantar Perpajakan.
- Khamis, Mohd Rabim Bin., Salleh, Ariffin Md., Nawi, Abd Samad. 2011. Compliance Behaviour of Business Zakat Payment in Malaysia: A Theoretical Economic Exposition, *8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance*, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation.
- Lado. Yuliano Osvaldo..dan M. Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *JRAMB*, 4(1): 2460-1233.
- Laihad Risal. 2013. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E – filling* Wajib Pajak di Kota Manado, *Jurnal EMBA*, 1(3).
- Mardiasmo. 2011.*Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Novitasari, R. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang III.
- Permadi, Gilang. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Survey pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta).

- Pertiwi, Anna. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees).
- Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni. Ni Luh Gede Erni Sulindawati. Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 7(1).
- Putri, Kadek Juniati, dan Putu Ery Setiawan. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2): 1112-1140.
- Rorong, Elizabeth Nadia., Lintje Kalangi dan Treesje Runtu. 2017. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2): 175-187.
- Saefudin, Deden. (2003). Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib pajak. *Berita Pajak*, :1492 (24 – 28).
- Saragih S. F. 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.
- Siregar, Dian Lestari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2): 119-128.
- Suerman. Maman. Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina. 2015. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informai*. 15(1).
- Utami, Renny Sri. 2013. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1).
- Wijayanto. Guntur Jati. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015.
- Winerungan, O.L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*.1(3): 960-970.
- Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putri dan Naniek Noviari. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3): 1652194.

Witono, Bayu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2): 196-208.

Wulandari, Tuti. 2015. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*. 2(2).

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.



L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Kesiediaan menjadi Responden

Responden yang terhormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program Sarjana (S-1), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), maka peneliti sangat mengharapkan kesiediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner yang terlampir.

Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan akademis, oleh karena itu jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan sangat besar manfaatnya bagi pengembangan ilmu dan penelitian saya, kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan ditempat kerja, sehingga saya berharap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Atas kerja sama dan ketersediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Makassar, 12 November

2019

Hormat Saya,

Agus Rahmat

Nim : 90400114107

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada pernyataan pilihan dengan memberi tanda (v) pada satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu.

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Umur :
2. Jenis Kelamin : Wanita ☐ Pria ☐
3. Status : Belum Menikah ☐ Menikah ☐
5. Tingkat Pendidikan : S3 ☐ S2 ☐ S1 ☐ D3 ☐ MA/SMK ☐
6. Pekerjaan : PNS ☐ Wirausaha ☐ Petani ☐
Lainnya ☐
7. Penghasilan/Tahun : <25 Juta ☐ 25 Juta - 50 Juta ☐
50 Juta - 75 Juta ☐ 75 Juta - 100 Juta ☐
>100 Juta ☐
8. Lama Menjadi Wajib Pajak : 1-5 tahun ☐ 5-10 tahun ☐ 15 tahun ☐
15-20 tahun ☐ >20 tahun ☐

- **Cara Pengisian Kuesioner**

Bapak/Ibu dan Saudara/i cukup memberikan tanda (v) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 4). Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang diberikan :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Setuju (S)

4 = Sangat Setuju (SS)

1. Pengetahuan *e-Filling*(X1)

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mengetahui <i>e-filling</i> merupakan penyampaian SPT tahunan secara elektronik atau online.				
2.	Saya mengetahui prosedur penggunaan <i>e-filling</i>				
3.	Saya menegetahui tata cara penyampaian SPT tahunan melalui <i>e-filling</i>				

2. Sosialisasi pajak (X2)

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sosialisasi perpajakan secara berkala menimbulkan kesadaran wajib pajak				
2.	Sosialisasi perpajakan yang rutin mendorong wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).				
3.	Sosialisasi perpajakan rutin dilaksanakan oleh Dirjen pajak				
4.	Sosialisasi perpajakan sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan				
5	Pemberian sosialisasi membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.				
6.	Wajib pajak banyak memperoleh informasi pajak melalui media sosial				

3. Sanksi Perpajakan (X3)

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sanksi pidana memotivasi saya untuk patuh terhadap kewajiban pajak				
2.	Sanksi administrasi pelanggaran pajak sangat berat				
3.	Sanksi pajak tidak dapat ditolerir				
4.	Sanksi pajak merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.				
5.	Pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasi.				

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)				
2.	Saya selalu menghitung pajak dengan benar				
3.	Saya selalu membayar pajak secara jujur				
4.	Saya melaporkan pajak tepat waktu				

5. Akhlak (M)

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Yakin secara logika pajak tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam				
2.	Yakin pajak adalah kewajiban warga Negara				
3.	Ketentuan pajak harus dipatuhi				
4.	Norma-norma pajak yang berlaku harus dipatuhi				
5.	Perilaku kecurangan pajak suatu saat akan ketahuan				
6.	Kecurangan pajak selalu diawasi pemerintah				

Lampiran 2

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

Pengetahuan e-Filling			
X1.1	X1.2	X1.3	Total
3	3	2	8
4	3	3	10
3	4	3	10
3	3	3	9
3	3	3	9
2	3	3	8
4	4	3	11
3	3	4	10
3	4	4	11
3	3	3	9
4	4	4	12
4	4	4	12
3	4	4	11
4	4	3	11
3	3	3	9
3	4	3	10
4	4	3	11
3	3	3	9
3	3	4	10
3	3	3	9
4	4	4	12
4	3	3	10
3	4	4	11
4	3	4	11
3	4	4	11
3	4	4	11
3	3	3	9
3	3	3	9
2	3	3	8
4	3	3	10
3	3	3	9
3	4	4	11
4	3	3	10
4	3	3	10
3	3	3	9
3	2	3	8

3	3	4	10
3	3	3	9
3	3	4	10
4	4	4	12
4	4	4	12
4	3	4	11
4	3	3	10
3	3	4	10
4	4	4	12
3	4	3	10
3	3	3	9
3	3	3	9
4	4	4	12
3	3	3	9
3	3	4	10
4	4	4	12
4	4	3	11
3	3	3	9
4	4	4	12
3	4	4	11
2	3	3	8
3	2	4	9
3	2	2	7
4	3	4	11
4	3	4	11
3	4	3	10
4	3	4	11
4	3	3	10

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Sosialisasi Pajak						
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	4	19
3	3	3	3	4	3	19
3	3	3	3	3	3	18
3	3	4	3	4	3	20
4	3	4	4	4	4	23
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	4	4	3	20
4	3	3	3	3	3	19
4	3	4	3	3	3	20
3	3	3	3	2	4	18
3	3	3	3	3	3	18
4	4	3	4	4	4	23
4	4	3	4	4	3	22
2	2	2	3	3	2	14
4	2	4	4	4	4	22
3	3	3	4	4	4	21
3	4	3	3	3	3	19
4	4	4	3	3	3	21
3	4	2	4	3	4	20
3	4	3	3	3	3	19
4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	4	3	4	21
4	3	2	4	4	3	20
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	4	3	3	19
4	4	3	4	4	3	22
3	3	3	3	4	3	19
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	4	4	4	21
3	4	4	4	4	4	23
3	3	3	3	3	3	18
1	1	1	1	1	1	6
3	3	4	3	4	3	20
4	3	3	3	3	3	19
4	4	3	3	4	2	20

4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	3	4	4	23
3	3	4	4	3	3	20
3	4	4	4	3	3	21
4	4	3	3	3	3	20
3	3	3	4	4	4	21
3	2	2	3	3	3	16
3	3	3	4	4	3	20
3	3	4	4	3	3	20
4	3	3	3	4	3	20
3	3	4	4	4	2	20
4	3	3	3	4	3	20
3	3	3	3	4	4	20
3	4	3	4	2	4	20
4	3	2	3	3	4	19
3	3	4	4	4	3	21
3	2	3	4	3	2	17
3	2	3	4	3	3	18
4	2	2	3	2	2	15
2	2	3	3	4	1	15
2	2	2	4	3	3	16
3	3	3	2	2	3	16
3	2	2	3	3	3	16
3	3	4	4	3	3	20
3	3	4	4	3	4	21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Sanksi Perpajakan					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total
2	3	3	3	3	14
2	3	4	4	3	16
3	2	3	3	3	14
3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	3	13
3	2	3	3	3	14
3	3	3	4	4	17
3	4	3	3	2	15
3	2	3	4	3	15
4	3	3	3	3	16
2	2	2	2	2	10
2	2	2	3	3	12
3	2	2	3	3	13
3	2	2	3	3	13
3	2	3	3	3	14
2	3	3	3	4	15
2	3	3	4	3	15
4	3	2	4	3	16
3	4	2	4	4	17
4	3	3	3	4	17
3	2	3	4	4	16
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	3	3	3	16
3	3	3	3	2	14
2	3	3	4	3	15
3	3	3	4	4	17
2	2	3	3	2	12
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	2	14
3	2	3	3	4	15
3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	2	12
3	3	3	3	4	16
3	2	3	3	2	13
1	4	1	4	1	11
3	2	2	3	2	12
3	3	3	3	3	15
3	2	3	3	3	14

4	4	3	3	3	17
2	4	2	3	2	13
3	3	3	3	3	15
3	3	4	3	4	17
2	2	2	3	3	12
2	2	2	3	1	10
4	4	1	3	4	16
2	2	2	3	1	10
2	2	2	3	3	12
3	3	3	3	4	16
1	2	2	3	2	10
4	3	2	3	2	14
3	2	3	3	2	13
3	3	2	3	4	15
3	2	3	4	3	15
2	2	3	4	3	14
2	2	3	4	2	13
4	3	3	2	4	16
1	1	1	3	1	7
2	3	2	3	2	12
3	3	3	4	3	16
3	3	2	3	2	13
2	2	2	3	3	12
3	2	3	3	3	14
3	3	4	4	3	17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Kepatuhan Wajib Pajak				
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Total
3	3	3	3	12
3	4	3	3	13
3	3	3	2	11
3	3	3	3	12
2	3	3	3	11
4	3	3	3	13
3	2	2	3	10
3	3	3	4	13
2	3	3	2	10
3	4	4	3	14
4	4	3	3	14
3	3	3	3	12
3	3	4	4	14
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	3	4	4	14
4	3	3	4	14
4	3	4	3	14
3	3	3	4	13
2	4	4	3	13
2	3	4	4	13
4	3	3	4	14
2	4	4	3	13
3	4	4	3	14
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	3	3	4	13
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	3	4	4	14
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
4	4	2	1	11
3	3	3	4	13
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12

4	3	4	3	14
4	3	3	4	14
3	4	4	3	14
3	3	4	4	14
3	3	3	3	12
4	3	3	3	13
3	3	4	2	12
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
4	4	4	3	15
4	3	3	3	13
3	3	3	3	12
3	3	4	4	14
3	3	2	3	11
3	2	3	3	11
3	4	4	4	15
3	2	3	4	12
3	2	3	4	12
3	2	3	4	12
2	2	3	2	9
2	2	3	3	10
3	3	3	3	12
4	3	2	2	11
3	4	4	3	14
3	4	4	3	14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Akhlak						
X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Total
4	3	3	3	4	3	20
3	3	3	3	4	4	20
3	3	4	3	3	3	19
4	4	4	3	3	3	21
4	4	3	3	4	4	22
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	4	4	3	3	3	20
2	2	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	3	18
2	4	4	4	4	4	22
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	4	19
3	3	3	3	3	4	19
3	3	2	3	3	3	17
4	3	3	3	4	3	20
4	4	3	3	4	4	22
4	4	4	3	4	4	23
3	3	3	4	4	3	20
4	4	3	4	4	4	23
4	4	4	3	4	4	23
3	4	4	3	3	4	21
4	4	3	3	4	3	21
3	4	4	3	4	3	21
3	3	3	3	4	3	19
4	3	3	3	4	2	19
2	3	3	3	3	3	17
4	3	4	3	3	3	20
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	2	4	4	19
3	3	3	3	4	4	20
3	3	3	3	3	3	18
2	3	2	2	3	4	16
3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	3	3	3	17
4	3	3	3	4	4	21
3	3	3	4	4	3	20
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	3	3	3	21

4	4	4	4	4	4	24
1	2	2	2	3	3	13
4	4	3	3	4	3	21
3	4	3	3	4	3	20
1	3	3	3	3	3	16
3	3	3	3	4	3	19
4	3	4	4	4	3	22
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	4	3	19
3	4	3	4	4	4	22
2	3	2	3	4	2	16
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	4	4	20
4	3	2	3	2	2	16
4	3	4	2	3	4	20
4	4	4	3	4	3	22
3	2	3	4	3	4	19
4	3	3	3	2	3	18
2	3	3	2	3	4	17
3	3	3	3	1	3	16
3	3	3	3	3	3	18
2	2	3	3	4	4	18
4	4	3	3	2	2	18
3	3	3	4	4	3	20
3	3	4	4	4	3	21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

LAMPIRAN 3

STATISTIK DESKRIPTIF

A. Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan <i>e-filling</i>	64	7	12	10.08	1.238
Sosialisasi pajak	64	6	24	19.25	2.714
Sanksi perpajakan	64	7	18	14.17	2.186
Kepatuhan wajib pajak	64	9	15	12.53	1.272
Akhlak	64	13	24	19.27	2.132
Valid N (listwise)	64				

B. Statistik Deskriptif Pernyataan

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pengetahuan *e-filling*

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase			Skor	Mean
		STS	TS	S		
X1.1		3	36	25	214	3,34
		4,7%	56,3%	39,1%		
X1.2		3	37	24	213	3,33
		4,7%	57,8%	37,5%		
X1.3		2	34	28	218	3,41
		3,1%	53,1%	43,8%		
	Rata-rata Keseluruhan					3,36

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sosialisasi Pajak

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase			Skor	Mean
		STS	TS	S		
X2.1	1	3	41	19	206	3,22
	1,6%	4,7%	64,1%	29,7%		
X2.2	1	9	39	15	196	3,06
	1,6%	14,1%	60,9%	23,4%		
X2.3	1	8	37	18	200	3,13
	1,6%	12,5%	57,8%	28,1%		
X2.4	1	1	34	28	217	3,39
	1,6%	1,6%	53,1%	43,8%		
X2.5	1	4	33	26	212	3,31
	1,6%	6,3%	51,6%	40,6%		
X2.6	2	5	39	18	201	3,14
	3,1%	7,8%	60,9%	28,1%		
	Rata-rata Keseluruhan					3,21

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase			Skor	Mean
		STS	TS	S		
X3.1	3	17	35	9	178	2,78
	4,7%	26,6%	54,7%	14,1%		
X3.2	1	27	29	7	170	2,66
	1,6%	42,2%	45,3%	10,9%		
X3.3	3	20	37	4	170	2,66
	4,7%	31,3%	57,8%	6,3%		
X3.4		2	46	16	206	2,22
		3,1%	71,9%	25,0%		
X3.5	4	15	31	14	183	2,86
	6,3%	23,4%	48,4%	21,9%		
	Rata-rata Keseluruhan					2,83



Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase			Skor	Mean
		STS	TS	S		
Y1		7	45	12	197	3,08
		10,9%	70,3%	18,8%		
Y2		7	45	12	197	3,08
		10,9%	70,3%	18,8%		
Y3		4	42	18	206	3,22
		6,3%	65,6%	28,1%		
Y4	1	5	41	17	201	3,16
	1,6%	7,8%	64,1%	26,6%		
	Rata-rata Keseluruhan					3,13



Deskripsi Item Pernyataan Variabel Akhlak

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase			Skor	Mean
		STS	TS	S		
M1	2	8	33	21	201	3,14
	3,1%	12,5%	51,6%	32,8%		
M2		4	42	18	206	3,22
		6,3%	65,6%	28,1%		
M3		5	44	15	202	3,16
		7,8%	68,8%	23,4%		
M4		5	49	10	197	3,08
		7,8%	76,6%	15,6%		
M5	1	3	29	31	218	3,41
	1,6%	4,7%	45,3%	48,4%		
M6		4	39	21	209	3,27
		6,3%	60,9%	32,8%		
	Rata-rata Keseluruhan					3,21

LAMPIRAN 4
UJI KUALITAS DATA

A. Uji Validitas

1. Variabel Pengetahuan *e-filling*

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	Total_X 1
X1.1	Pearson Correlation	1	.285*	.254*	.704**
	Sig. (2-tailed)		.022	.043	.000
	N	64	64	64	64
X1.2	Pearson Correlation	.285*	1	.378**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.022		.002	.000
	N	64	64	64	64
X1.3	Pearson Correlation	.254*	.378**	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.043	.002		.000
	N	64	64	64	64
Total_X 1	Pearson Correlation	.704**	.757**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Variabel Sosialisasi Pajak

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total_X 2
X2.1	Pearson Correlation	1	.520**	.320**	.240	.382**	.384**	.674**
	Sig. (2-tailed)		.000	.010	.057	.002	.002	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
X2.2	Pearson Correlation	.520**	1	.441**	.293*	.315*	.468**	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.019	.011	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
X2.3	Pearson Correlation	.320**	.441**	1	.419**	.405**	.336**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000		.001	.001	.007	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
X2.4	Pearson Correlation	.240	.293*	.419**	1	.480**	.437**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.057	.019	.001		.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
X2.5	Pearson Correlation	.382**	.315*	.405**	.480**	1	.250*	.679**
	Sig. (2-tailed)	.002	.011	.001	.000		.046	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
X2.6	Pearson Correlation	.384**	.468**	.336**	.437**	.250*	1	.696**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.007	.000	.046		.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
Total_X 2	Pearson Correlation	.674**	.731**	.707**	.681**	.679**	.696**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Variabel Sanksi Perpajakan

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X 3
X3.1	Pearson Correlation	1	.312*	.323**	-.129	.487**	.696**
	Sig. (2-tailed)		.012	.009	.311	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64
X3.2	Pearson Correlation	.312*	1	.117	.179	.244	.593**
	Sig. (2-tailed)	.012		.358	.157	.052	.000
	N	64	64	64	64	64	64
X3.3	Pearson Correlation	.323**	.117	1	.185	.423**	.657**
	Sig. (2-tailed)	.009	.358		.143	.001	.000
	N	64	64	64	64	64	64
X3.4	Pearson Correlation	-.129	.179	.185	1	.116	.337**
	Sig. (2-tailed)	.311	.157	.143		.361	.006
	N	64	64	64	64	64	64
X3.5	Pearson Correlation	.487**	.244	.423**	.116	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.052	.001	.361		.000
	N	64	64	64	64	64	64
Total_X 3	Pearson Correlation	.696**	.593**	.657**	.337**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.006	.000	
	N	64	64	64	64	64	64

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ALAUDDIN
MAKASSAR

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations		Y1	Y2	Y3	Y4	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.140	-.165	.010	.421**
	Sig. (2-tailed)		.269	.193	.936	.001
	N	64	64	64	64	64
Y2	Pearson Correlation	.140	1	.421**	-.177	.582**
	Sig. (2-tailed)	.269		.001	.161	.000
	N	64	64	64	64	64
Y3	Pearson Correlation	-.165	.421**	1	.317*	.696**
	Sig. (2-tailed)	.193	.001		.011	.000
	N	64	64	64	64	64
Y4	Pearson Correlation	.010	-.177	.317*	1	.555**
	Sig. (2-tailed)	.936	.161	.011		.000
	N	64	64	64	64	64
Total_Y	Pearson Correlation	.421**	.582**	.696**	.555**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5. Variabel Akhlak

Correlations

		M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total_M
M1	Pearson Correlation	1	.501**	.374**	.188	.139	-.014	.658**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.137	.274	.910	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
M2	Pearson Correlation	.501**	1	.472**	.175	.233	.116	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.167	.064	.362	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
M3	Pearson Correlation	.374**	.472**	1	.257*	.175	.224	.679**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.040	.166	.076	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
M4	Pearson Correlation	.188	.175	.257*	1	.298*	-.019	.490**
	Sig. (2-tailed)	.137	.167	.040		.017	.882	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
M5	Pearson Correlation	.139	.233	.175	.298*	1	.299*	.610**
	Sig. (2-tailed)	.274	.064	.166	.017		.016	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
M6	Pearson Correlation	-.014	.116	.224	-.019	.299*	1	.437**
	Sig. (2-tailed)	.910	.362	.076	.882	.016		.000
	N	64	64	64	64	64	64	64
Total_M	Pearson Correlation	.658**	.696**	.679**	.490**	.610**	.437**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

M A K A S S A R

B. Uji Reliabilitas

1. Variabel Pengetahuan *e-filling*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.793	4

2. Variabel Sosialisasi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.774	7

3. Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.748	6

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.690	5

5. Variabel Akhlak

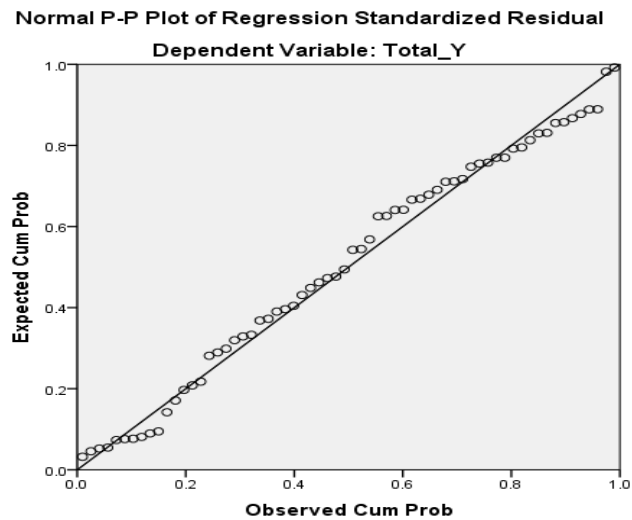
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.737	7

LAMPIRAN 5

UJI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.84487679
	Absolute	.086
Most Extreme Differences	Positive	.074
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.686
Asymp. Sig. (2-tailed)		.734

a. Test distribution is Normal.

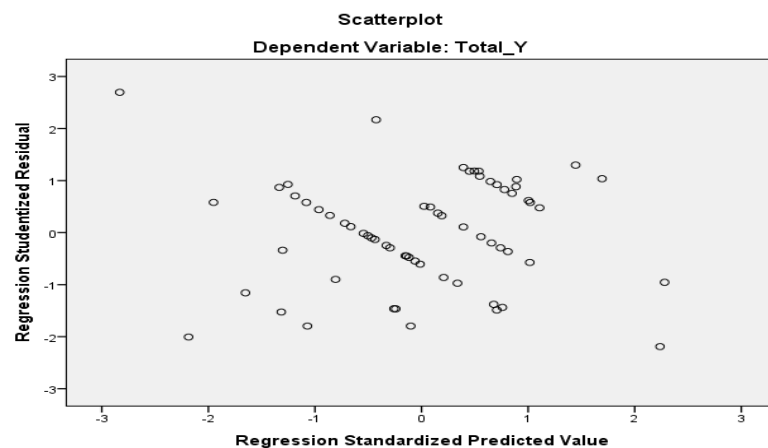
b. Calculated from data.

ALAUDDIN
MAKASSAR

B. Uji Multikoleneartas

Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan <i>e-filling</i>	,866	1,155
	Sosialisasi pajak	,796	1,257
	Sanksi Perpajakan	,775	1,291
	Akhlak	,842	1,188
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

C. Uji Heteroskedastisitas



D. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.162	.639		.253	.801
	Pengetahuan <i>e-filling</i>	.028	.052	.073	.547	.586
	Sosialisasi pajak	-.022	.025	-.122	-.865	.391
	Sanksi perpajakan	.046	.029	.210	1.572	.121

a. Dependent Variable: RR

M A K A S S A R

LAMPIRAN 6

UJI HIPOTESIS

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 ^a	.338	.305	1.061

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan *e-filling*, Sosialisasi Pajak

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	34.457	3	11.486	10.212	.000 ^b
Residual	67.481	60	1.125		
Total	101.938	63			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi perpajakan, pengetahuan *e-filling*, sosialisasi pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.935	1.404		4.229	.000
Pengejtahuan <i>e-filling</i>	.233	.114	.227	2.045	.045
Sosialisasi pajak	.218	.055	.466	3.980	.000
Sanksi perpajakan	.003	.065	.005	.049	.961

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

B. Analisis Regresi Moderasi dengan Uji Interaksi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.559	.504	.896

- a. Predictors: (Constant), X3.M, Pengetahuan *e-filling*, Sosialisasi pajak, Akhlak, Sanksi perpajakan, X1.M, X2.M

ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56.967	7	8.138	10.134	.000 ^b
	Residual	44.970	56	.803		
	Total	101.938	63			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

- b. Predictors: (Constant), X3.M, Pengetahuan e-filling, Sosialisasi pajak, Akhlak, Sanksi perpajakan, X1.M, X2.M

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.557	9.858		.665	.509
	Pengetahuan e-filling	-1.617	.887	-1.575	-1.823	.074
	Sosialisasi Pajak	1.741	.467	3.714	3.731	.000
	Sanksi Perpajakan	-1.110	.498	-1.907	-2.228	.030
	Akhlak	.001	.515	.001	.002	.999

X1_M	.094	.046	2.607	2.026	.048
X2_M	-.079	.024	-4.357	-3.268	.002
X3_M	.056	.026	2.637	2.130	.038

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Output SPSS 21 (2019)





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 0020 Tahun 2019**

**T E N T A N G
PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Agus Rahmat Nim: 90400114107 tertanggal untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Pengaruh pengetahuan sistem Automatic Exchange of Information (AEOL) Kualitas E- TAX dan taxation Sanctions terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan regiusitas sebagai Variabel Moderating (Studi kasus pada KPP Pratama Makassar)
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Lince Bulutoding, SE , M Si , Ak
2. Sumarlin, SE ,M Ak
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 31 Januari 2019

PROF. DR. H. AMBO ASSE, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM 4, MAKASSAR 90232
TELEFON (0411)456132- 42220(HUNTING), FAKSIMILE (0411)456131 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1505200,
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 723/WPJ.15/BD.05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Makassar Selatan
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Penelitian
Tanggal : 27 November 2019

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor : 6272/EB./IPP.00.9/11/2019 tanggal 12 November 2019
tentang Penerusan Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Agus Rahmat
NIM : 90400114107
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Program : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan E-Filing, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak sebagai Variabel Moderasi

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada
Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di Kepala KPP Pratama
Makassar Selatan sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk
keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia
jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar
dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami.
Soft copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut:
perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Eko Pandoyo Wisnu Bawono

Kp..BD.05/BD.0501/2019

M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Agus Rahmat, lahir di Pappa'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 12 April 1995 dari pasangan suami istri H. Amiruddin dan Hj. Fatmawati. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pertama kali melangkahkan kaki ke dunia

pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Panggala pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah (MTS) Babul Khaer Bulukumba pada tahun 2008-2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya masih di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah (MA) Babul Khaer Bulukumba pada tahun 2011-2014. Kemudian setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi terhitung mulai tahun 2014-2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR